

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Laporan Keuangan Pada Sektor Transportasi

Winy Alwijaya^{*1}, Rolendo², Tetty Tiurma Uli³

¹Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, Kota Medan, 20118, Indonesia

*Email korespondensi: winy.alwijaya98@gmail.com¹

Diterima 5 September 2019; Disetujui 29 Oktober 2019; Dipublikasi 30 Oktober 2019

Abstract: *The integrity of financial statements in the transportation company sector is much below the standard requirements of the IDX and many transportation sectors are not listed on the IDX. Financial report integrity (dependent variables) are analyzed by independent variables consisting of x1 = Board of Directors size, x2 = Proportion of Independent Commissioners (PKI), x3 = Audit Committee (KA) and x4 = Institutional Ownership (KI). The value of the F test regression results is 2.475 with a significance of 0.05, while the t test is only institutional ownership that has an effect of 3.035 and significant 0.03 means that the greater the number of institutional ownership, the better the integration of financial statements.*

Keywords: *Corporate Governance, The Integrity Of Financial Reports, Transportation*

Abstrak: Integritas laporan keuangan pada sektor perusahaan transportasi banyak yang dibawah standar ketentuan dari BEI dan banyak sektor transportasi yang tidak terdaftar di BEI. Integritas laporan keuangan (variabel dependent) dianalisis dengan variabel independent yang terdiri dari x1 = ukuran Direksi, x2 = Proporsi Komisaris Independen (PKI), x3 = Komite Audit (KA) dan x4 = Kepemilikan Instutisional (KI). Nilai hasil regresi uji F sebesar 2,475 dengan signifikan sebesar 0,05, sedangkan uji t nya hanya kepemilikan instutisional yang berpengaruh yaitu 3,035 dan signifikan 0,03 berarti semakin banyak jumlah kepemilikan instutisional, maka integrasi laporan keuangan akan semakin baik.

Kata kunci : *Corporate Governace, Integritas Laporan Keuangan, Transportasi.*

Indonesia mulai mengenal tentang Corporate Governance ketika krisis ekonomi di kawasan Asia yang juga menimpa Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis ekonomi tersebut melemahkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Ramadhani dan Lukviarman, 2009). Krisis tahun 1998 merupakan krisis ekonomi terburuk yang terjadi di Indonesia, sehingga terjadi inflasi pada perekonomian Indonesia. Pada tahun

1997, Indonesia mengalami peningkatan inflasi sebesar 11,10% dan mengalami kenaikan sebesar 77,60% pada tahun 1998. Kenaikan inflasi tahun 1998 merupakan kenaikan inflasi tertinggi di Indonesia hingga sekarang, kedua pada tahun 2005 dan ketiga pada tahun 2008.

Tabel 1. Tingkat Inflasi (dalam%)

Tahun	Inflasi	Tahun	Inflasi
1996	6,50	2008	11,06
1997	11,10	2009	2,78
1998	77,60	2010	6,96
1999	2,00	2011	3,79
2000	9,40	2012	4,36
2001	12,55	2013	5,47
2002	10,03	2014	8,36
2003	5,16	2015	5,85
2004	6,40	2016	3,53
2005	17,11	2017	3,81
2006	6,60	2018	3,20
2007	6,59		

Sumber: Data diolah, 2019 (www.bi.go.id)

Salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disinyalir sebagai akibat lemahnya Corporate Governance dan etika yang melandasinya (Hamdani, 2016:1). Dengan adanya Corporate Governance dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat Corporate Governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. Pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktik Corporate Governance. Survey mengenai tingkat Corporate Governance dilakukan oleh Political Economic Risk Consultancy (PERC) di sebelas negara di Asia termasuk Indonesia. Seperti pada tabel 2

Tabel 2. Skor Peringkat Corporate Governance di Asia tahun 2000

No.	Negara	Skor
1.	Singapura	2,00
2.	Hongkong	3,59
3.	Jepang	4,00
4.	Filipina	5,00
5.	Taiwan	6,10
6.	Malaysia	6,20
7.	Thailand	6,67
8.	China	8,22
9.	Indonesia	8,29
10.	Korea Selatan	8,83
11.	Vietnam	8,89

Sumber: PERC dalam, Helena Savera

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PERC (Political Economic Risk Consultancy), Indonesia berada di posisi tiga terbawah dari sebelas negara Asia yang menerapkan Corporate Governance. Menurut PERC yang dikutip dalam Helena (2018:144), semakin tinggi skor, maka akan semakin buruk Corporate Governance-nya. Peringkat yang diperoleh Indonesia menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan Corporate Governance di Indonesia dibanding dengan negara Asia yang disebutkan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan corporate governance di Indonesia masih rendah dan upaya perbaikan Corporate Governance yang belum komprehensif. Buruknya Corporate Governance mengancam kelangsungan investasi yang akan masuk ke Indonesia. Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam pengoptimalan kinerja, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya (OECD, 1999).

Menurut (Wardhani, 2007) Dewan Direksi merupakan suatu mekanisme corporate governance yang bertugas untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup lima tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab social (KNKG, 2006).

Kepemilikan institusional adalah bagian dari

struktur kepemilikan dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para pihak institusional. Tingginya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong aktivitas monitoring karena besarnya kekuatan voting mereka yang akan mempengaruhi kebijakan manajemen (Schleifer dan Vishny, 1986 dalam Wardhani, 2007). Dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional yang tinggi ini maka pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan.

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi yang sama pentingnya dengan faktor-faktor produksi umum lainnya seperti modal dan tenaga kerja. Kemajuan pelaksanaan pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur penunjangnya, terutama infrastruktur transportasi, peran transportasi lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (www.bappenas.go.id, 2019). Sektor transportasi masih memiliki peluang investasi yang besar dengan permintaan akan transportasi darat, udara dan laut, di samping itu pasar domestik masih memiliki peluang yang cukup kuat. Pertumbuhan sarana transportasi semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang juga semakin meningkat. Dengan banyaknya pertumbuhan tersebut semakin berkembanglah perusahaan transportasi di Indonesia. Namun perkembangan tersebut dihambat oleh masalah-masalah yang timbul pada sektor transportasi di Indonesia seperti meningkatnya harga bahan bakar, kelangkaan bahan bakar dan kecelakaan transportasi yang dapat

membuat kerugian.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan transportasi adalah:

1. Laporan keuangan yang dilaporkan di bursa efek Indonesia banyak yang tidak wajar atau jujur.
2. Komite Audit tidak independen dalam melakukan pemeriksaan.
3. Komisaris banyak yang tidak aktif atau hanya numpang nama saja.
4. Komisaris tidak melakukan kegiatan pengawasannya dengan baik.
5. Kepemilikan saham tidak jelas pemisahan sahamnya.

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Beberapa perusahaan transportasi didapati menerbitkan laporan keuangan dengan integritas yang rendah karena tidak mencerminkan realitas sesungguhnya.
2. Fungsi pengawasan yang dilakukan kurang optimal.
3. Beberapa perusahaan transportasi didapati memanipulasi data akuntansi.
4. Beberapa perusahaan transportasi didapati memiliki manajemen yang berperan ganda.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Dwidinda (2017) Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata

laporan keuangan yang overstate akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) (dalam Barnea dan Rubin, 2005) yang menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Iskandar, dkk (1999) menyatakan bahwa *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return.

Mekanisme *corporate governance* membawa beberapa manfaat, antara lain:

- a. Mengurangi *agency cost* yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008).

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum GCG, peran Komisaris Independen, sangat diperlukan. Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek-praktek transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara).

Menurut Brigham (2005:528) Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan investasi saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti: perusahaan, dana pensiun, reksadana dll dalam jumlah yang besar. Institusi adalah pengambil keputusan profesional yang mengetahui bagaimana mengukur kinerja perusahaan dan cara untuk mengawasi pihak manajemen. Kepemilikan institusi akan memiliki pengaruh pada biaya keagenan dan konsekuensinya berdampak pada kebijakan pembayarandividenden.

Kompetensi komite audit menjadi salah satu karakteristik yang penting untuk memastikan bahwa komite audit melaksanakan tugas mereka secara efektif. Komite audit yang memiliki anggota dengan kompetensi akuntansi atau keuangan akan memiliki standar yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan akan selalu berusaha untuk menghasilkan kinerja dan image yang baik bagi perusahaan (Rahmat et al., 2009).

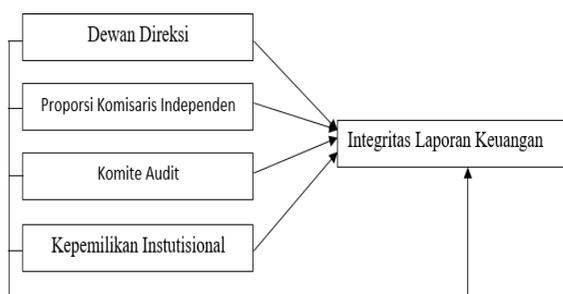
FCGI (2002) berpendapat bahwa komite audit minimal harus memiliki satu orang anggota yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang akuntansi. Anggota komite audit yang menguasai akuntansi akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat et al.,

2009).

Menurut Nabela (2012:2) definisi kepemilikan institusional adalah: “Merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase.

Semakin banyak anggota komite audit yang berkompetensi dibidang akuntansi atau keuangan maka akan semakin efektif dalam memitigasi perusahaan dari integritas laporan keuangan. Sedikitnya jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi atau keuangan akan membuat perusahaan mengalami penurunan kinerja sehingga menyebabkan perusahaan tidak memiliki integritas laporan keuangan.

Dalam melakukan penugasan umum, auditor ditugasi memberikan opini atas laporan keuangan satuan usaha. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (SPAP, 1994, alinea 1).



Gambar 1. Kerangka konseptual

Hipotesis

H1 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017

H4: Komite Audit berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017

H5: Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel independen yaitu *corporate governance* terhadap variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan baik secara simultan maupun secara parsial.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 35 perusahaan. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (Gozhali 2013).

Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian ini mengenai pengaruh corporate governance terhadap integritas laporan keuangan, setiap sampel bersumber dari laporan keuangan perusahaan transportasi yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji-t

Tabel 3. Uji-t

Model	Coefficients				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	-,503	1,042			-,483	,360
Dewan Direksi	,070	,119	,068		,584	,561
1 Komisaris Independent	-,082	,270	-,035		-,304	,761
Komite Audit	,216	,297	,077		,728	,469
Kepemilikan Instusional	2,299	,758	,304		3,035	,003

a. Dependent Variable: Intebritas Laporan Keuangan
Sumber: Hasil Pengolahan data di SPSS

Dilihat dari tabel diatas, nilai t_{hitung} Dewan direksi, komisaris independent, dan komite audit dibawah nilai t_{tabel} yaitu < 1.98525 , artinya Dewan direksi, komisaris independent, dan komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap Integritas laporan keuangan, Nilai t_{hitung} Kepemilikan Instusional sebesar 3,035 dengan signifikan 0,003, lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1.98525, artinya secara parsial kepemilikan instusional berpengaruh signifikan terhadap Integritas laporan keuangan.

Uji-F

Tabel 4. Hasil Uji-F

ANOVA a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	25,562	4	6,390	2,475	,050
1 Residual	232,337	90	2,582		
Total	257,899	94			

a. Dependent Variable: Intebritas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Instusional, Komisaris Independent, Komite Audit, Dewan Direksi

Nilai F_{hitung} adalah 2,474 dengan signifikan 0,05 sedangkan F_{tabel} 2,470 yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dari hasil menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan instusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Nilai hasil regresi pada tabel diatas untuk variabel ukuran Dewan Direksi memiliki nilai koefisien yang positif, yaitu sebesar 0,584. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki ukuran Dewan Direksi semakin besar maka perusahaan tersebut mengalami itegritas laporan keuangan yang kurang baik.

Hasil Pengujian Hipotesis 2

Nilai hasil regresi untuk variabel Proporsi Komisaris Independen (PKI) memiliki nilai koefisien negatif, yaitu -0,304. Dengan demikian berarti perusahaan yang memiliki Proporsi Komisaris Independent yang semakin besar maka perusahaan tersebut mengalami integritas laporan keuangan yang rendah (kurang baik). Ini berarti bahwa berapapun Proporsi Komisaris Independen dalam suatu perusahaan, kemungkinan perusahaan tersebut mengalami Integritas laporan keuangan yang sama. Tidak signifikannya hubungan antara Proporsi Komisaris Independen dan Integritas Laporan Keuangan.

Hasil Pengujian Hipotesis 3

Nilai hasil regresi untuk variabel Komite Audit (KA) memiliki nilai koefisien positif, yaitu ,728. Dengan demikian berarti perusahaan yang memiliki Komite Audit yang semakin besar maka perusahaan tersebut mengalami Integritas Laporan Keuangan semakin tinggi (baik).

Hasil Pengujian Hipotesis 4

Nilai hasil regresi untuk variabel Kepemilikan Institusional (KEPINST) memiliki nilai koefisien positif, yaitu 3,035. Dengan demikian berarti perusahaan yang memiliki Kepemilikan Institusional yang semakin besar maka perusahaan tersebut mengalami Integritas Laporan Keuangan akan semakin membaik atau meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hanya nilai t_{hitung} kepemilikan institusional yang berpengaruh secara parsial yaitu sebesar 3,035 dengan signifikan 0,003, yaitu lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1.98525, artinya kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Integritas laporan keuangan.
2. Nilai F_{hitung} adalah 2,475 sedangkan F_{tabel} 2,470 yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dari hasil menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Saran

Disarankan agar menambah variabel corporate yang lebih banyak lagi untuk dapat mengetahui Integritas Laporan Keuangan yang lebih baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Mas Daniri. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia

Bappenas, (2019). *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan*

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

<https://www.bappenas.go.id/>

BI, (2019). Bank Indonesia. *Bank Sentral Republik Indonesia*. <https://www.bi.go.id>

Brigham, E,F & Weston, J,F. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Kesembilan*, Jilid 2, Jakarta: Penerbit Erlangga,

Budiono. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.

Djoko Pradopo, Rachmat dkk. (2003). *Metodologi Penelitian Sastra*. Bandung: Hanindita.

De Zoort T., et al. (2002). Audit Committee Effectiveness: A synthesis of Emperical Audit Committee Literatur. *Journal of Accounting Literatur*, 21. 38-76.

Dwidinda, J. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *E-Proceeding of Management*, 4(3), 2821-2829.

FCGI. (2001). *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance : Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Helena, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress.

- Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 60(2), 143-152.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Lukviarman, N. (2001). Key Characteristics of Corporate Governance: The case of Indonesia, Working Paper, No. 01-01. Graduate School business, Curtin University of Technology. Perth
- Nabela, Yoandhika. (2012). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Universitas Negeri Padang*, 01(01), September 2012.
- Nurjanah, Lita dan Dudi Pratomo. (2017) Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan, *Jurnal Universitas Telkom*.
- Pancawati Hardiningsih. (2010). Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Kajian Akuntansi*. 2(1). pp. 61-76.
- Panky P. S. R. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), pp. 1-7.
- Rahmat, M.M., Iskandar, T.M, dan Saleh, N.M. (2009). Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and non-Distressed Companies. *Managerial Auditing Journal*, 24(7). pp 624-638.
- Saputra Desmiawati, dan Yuneita. (2014). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012)*. Pekanbaru: Faculty of Economics Riau University.
- Wardhani,R. (2007). Mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan (financially distressed firms). *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang

▪ *How to cite this paper :*

- Alwijaya, W., Rolendo, R., & Uli, T. T. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Laporan Keuangan Pada Sektor Transportasi. *Jurnal Humaniora*, 3(2), 110–117.